

KRISIS EKONOMI INDONESIA

Elly Karmeli
Siti Fatimah

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Sumbawa

ABSTRACT

The impact of economic crisis in Indonesia is the occurrence of so many fundamental changes in the economic order, social, political, and cultural life of the country which determines the country's direction. In one side, it is the biggest changes in modern Indonesian history, but on the other hand, it contributes to the complexity of the recovery problem economy. The weakness of the Indonesian economy, the big amount of the firm's short-term loans in foreign currency (dollar) without any protection / hedging, weak banking systems in Indonesia and the weak of the real sectors, could be a lessons for us so that Indonesia will no longer mired in economic crisis. Besides economic, there are also weakness of political and social structure, financial and banking system, the system of ownership, and also the system of law and democratic system itself. Several behaviors that could promote or complicate the crisis in facing the turmoil of the endurance life is the greater of expenditures than revenues in both economic activity and living in a society and state, and the crisis of cultural values (the closure, feudalism, and tribalism).

Keywords: *economic crisis, monetary, rehabilitation*

A. LATAR BELAKANG

Selama hampir tiga dekade dari tahun 1970 hingga pertengahan tahun 1997 perekonomian Indonesia memperlihatkan stabilitas kinerja yang sangat baik. Bahkan pada tahun 1993, Bank Dunia mengategorikan Indonesia kedalam klasifikasi “*New Industrialized Economies*” (NIEs), bersama dengan Malaysia dan Thailand. Produk Domestik Bruto (PDB) riil tumbuh rata-rata 7 persen setahun dan inflasi terkendali pada tingkat dari sekitar US\$ 100 tahun 1970 menjadi sebesar US\$ 1.014 di tahun 1996 dan jumlah penduduk miskin menurun dari sekitar 60 persen menjadi 11 persen. Dalam tahun 1996, PDB riil bahkan masih tumbuh sekitar 8 persen.

Pada pertengahan tahun 1997 terjadi krisis nilai tukar rupiah yang meluas menjadi krisis ekonomi. Sepanjang tahun 1998, rupiah terdepresiasi dengan lebih dari 70 persen yang mencapai puncaknya pada bulan Juli 1998 dimana nilai tukar mencapai Rp. 14.700 per US\$. Tahun 1997 PDB tumbuh sebesar 4,7 persen dan berkontraksi hingga minus 13,1 persen di tahun 1998. Inflasi yang hanya berkisar rata-rata 8,1 persen antara 1991-1996, pada tahun 1998 meningkat tajam menjadi 77,6 persen, yang sebagian besar berasal dari barang-barang yang diperdagangkan secara internasional. Setelah gagal menahan laju depresiasi rupiah, Bank Indonesia pada bulan Juli 1998 menaikkan tingkat suku bunga SBI satu bulan hingga 70 persen. Pada tahun 1998, akibat permintaan domestik yang menurun tajam, impor barang konsumsi dan ekspor migas mengalami penurunan masing-masing dengan 34 persen dan 36 persen.

Krisis ekonomi Indonesia mencapai titik puncak pada tahun 1998, yang ditandai oleh kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar 13,1 persen. Setelah itu pertumbuhan ekonomi sudah bergerak ke arah positif. Namun demikian, dampak krisis ekonomi belum hilang dari kehidupan masyarakat. Salah

satu dampak utama dari krisis ekonomi di Indonesia adalah terjadinya begitu banyak perubahan mendasar dalam tatanan ekonomi, sosial, politik, dan budaya yang menentukan arah kehidupan bernegara, disatu sisi merupakan perubahan yang terbesar dalam sejarah Indonesia modern, namun disisi lain memberikan kontribusi bagi kompleksitas permasalahan pemulihan ekonomi. Krisis multi dimensi ini merupakan antiklimaks dari sukses perekonomian Indonesia sepanjang hampir tiga dekade di pemerintah Orde Baru sejak dicanangkannya Repelita Pertama pada tahun 1969.

Kontraksi perekonomian diikuti oleh pertumbuhan negatif hampir semua lapangan usaha. Sektor konstruksi mengalami kontraksi 36,44 persen disusul oleh sektor keuangan, persewaan dan jasa-jasa perusahaan dengan produksi terbesar terjadi pada industri berat seperti mesin-mesin, baja, otomotif, dan bahan konstruksi. Krisis ekonomi tersebut kemudian membuat Pemerintah memusatkan kebijakan program dan pendanaannya kepada Jaring Pengaman Sosial (JPS), restrukturisasi sektor moneter, dan rekapitulasi perbankan. Konsentrasi dana dan daya ini menyebabkan sektor produksi (barang dan jasa) seperti terabaikan walaupun kondisinya sama buruknya dengan sektor perbankan sebagai akibat bunga bank yang tinggi, kurs dolar yang fluktuatif, dan hutang korporasi jangka pendek.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan dibahas oleh penulis adalah *pertama*, bagaimana kronologis kejadian krisis ekonomi di Indonesia? *kedua*, apakah yang menjadi penyebab krisis ekonomi di Indonesia? *ketiga*, apa dampak sosial yang ditimbulkan oleh krisis ekonomi ini? *keempat*, cara apa yang mesti ditempuh untuk mengatasi krisis ekonomi Indonesia? serta *kelima*, bagaimana sikap kita agar tidak terjadi krisis lagi ?

B. KRONOLOGIS KRISIS DI INDONESIA

Krisis itu sendiri di dalam laporan IMF, World Economic Outlook yang baru digolongkan menjadi berbagai jenis, yaitu (1). *Currency crisis*, (2). *Banking crisis*, (3). *Systemic financial crisis* dan (4). *Foreign debt crisis*. Kerawanan perekonomian bisa terjadi karena unsur-unsur yang pada dasarnya bersifat internal, seperti kebijaksanaan makro yang tidak sustainable, lemahnya atau hilangnya kepercayaan terhadap mata uang dan lembaga keuangan dan ketidakstabilan politik, atau yang berasal dari faktor eksternal, seperti kondisi keuangan global yang berubah, misalignment dari nilai tukar mata uang dunia (dollar dengan yen), atau perubahan cepat dari sentimen pasar yang meluas karena *herd instinct* dari pelaku dunia usaha.

Yang terjadi di Indonesia dimulai dengan dampak dari proses penularan, dimana rupiah tertekan di pasar mata uang setelah dan bersamaan dengan apa yang terjadi di negara-negara tetangga, dimulai dengan depresiasi yang drastis dari baht Thailand. Akan tetapi kemudian dengan langkah kebijakan yang dilakukan dan implikasi dari padanya (pelebaran rentang kurs intervensi, pengambangbebasan rupiah, intervensi BI dan pengetatan likuiditas), terjadi proses yang bersifat downward spiral dari proses penularan, sehingga gejala kurs rupiah menjalar menjadi masalah tertekannya perbankan (karena kelemahan sektor ini). Ketidakpercayaan terhadap rupiah menjalar menjadi ketidakpercayaan terhadap perbankan (adanya *flights to quality* dan *flights to safety*) yang menimbulkan krisis perbankan. Dalam keadaan ini bank tidak hanya ditinggalkan deposan akan tetapi juga ditinggalkan bank lain (terganggunya pasar uang antar bank yang tersekat-sekat), termasuk akhirnya bank-bank mitra usaha di luar negeri (penolakan L/C dari bank nasional oleh bank luar negeri).

Krisis perbankan kemudian menjalar kepada nasabah mereka (mahalnya atau hilangnya kredit bank), sehingga masalah sektor keuangan langsung berpengaruh negatif terhadap sektor riil (kegiatan konsumsi, produksi, perdagangan dan investasi). Dari perkembangan ini secara cepat krisis keuangan ini menjadi krisis sosial (perusahaan yang tidak memperoleh pinjaman bank mulai melakukan PHK terhadap karyawannya), dan kemudian menimbulkan krisis dalam kehidupan politik yang memuncak dengan terjadinya krisis kepemimpinan nasional yang sampai sekarang belum terselesaikan.

Mengenai perkembangan terjadinya krisis, mungkin secara kronologis dapat disebutkan secara singkat, apa yang terjadi sejak bulan Juli 1997, sebagai berikut:

1. Tertekannya nilai tukar rupiah setelah terjadi hal yang serupa terhadap baht Thailand yang diikuti dengan pengambang baht tanggal 2 Juli 1997 dan peso Pilipina 11 Juli 1997.
2. Dilakukan pelebaran kurs intervensi rupiah dari 8% menjadi 12% pada 11 Juli 1997, setelah dilakukan pelebaran sebanyak enam kali sejak 1994.
3. Dilakukan penghapusan rentang kurs intervensi atau pengambangbebasan rupiah pada tanggal 14 Agustus 1998.
4. Dilakukan intervensi dalam pasar valas menghadapi tekanan yang timbul baik setelah pelebaran kurs intervensi maupun setelah 14 Agustus 1997.
5. Langkah-langkah kebijakan makro dan sektoral 3 September 1997, suatu “self imposed IMF program “
6. Keputusan untuk meminta bantuan IMF awal Oktober 1997.
7. Perundingan dengan IMF yang menghasilkan ‘letter of intent’ pertama, 31 Oktober 1997, dari precautionary menjadi standby arrangement. Program yang akan diimplementasikan meliputi kebijakan pengendalian moneter dan nilai tukar, langkah-langkah fiskal, restrukturisasi sektor keuangan dan restrukturisasi sektor riil.
8. Kebijakan pencabutan ijin usaha 16 bank dan implikasinya.
9. Pencairan pinjaman tahap pertama \$3 milyar dari pinjaman IMF \$10 milyar sebagai bagian dari paket \$43 milyar. Intervensi pasar valas bersama Jepang dan Singapore yang berhasil, kemudian implementasi program dengan dukungan IMF yang kurang lancar (masalah tuntutan terhadap Gubernur BI dan Menkeu di PTUN, ketidakjelasan pelaksanaan penghapusan monopoli dan penundaan proyek-proyek serta pelaksanaan kebijakan moneter yang seret) dan reaksi pasar yang negatif
10. Proses terjadinya ‘letter of intent’ kedua, 15 Januari 1998, didahului dengan desakan G7.
11. Reaksi pasar terhadap kemungkinan pencalonan Habibie sebagai Wapres.
12. Pelaksanaan restrukturisasi perbankan dengan pemberian garansi terhadap semua deposito, giro, tabungan dan pinjaman perbankan serta pendirian BPPN.
13. Heboh CBS, usulan Steve Henke, dan implikasi yang ditimbulkan.
14. keputusan BPPN membekukan 7 bank serta melaksanakan pengawasan intensif terhadap 7 bank lain.
15. perundingan Pemerintah dengan IMF yang menghasilkan “Memorandum Tambahan tentang Kebijaksanaan Ekonomi dan Keuangan”, yang ditanda tangani Menko Ekuin pada tanggal 9 April 1998.
16. penyelesaian pinjaman swasta dengan berbagai perundingan di Tokyo, New York dan Frankfurt
17. Pengumuman Kabinet Reformasi dan pemberian status independen ke pada Bank Indonesia setelah pergantian Presiden dari Soeharto ke Habibie.

Penyebab Timbulnya Krisis

Jika dilihat dari proses terjadinya, krisis moneter di Indonesia didahului oleh suatu *euphoria*, adanya pertumbuhan yang tinggi dalam kurun waktu yang lama yang digambarkan sebagai *economic miracle* oleh Bank Dunia) timbul perkembangan yang menampakkan tanda-tanda adanya bubbles seperti ekspansi real estates yang kelewat besar dan pertumbuhan pasar saham yang luar biasa bersamaan dengan masuknya dana luar negeri berjangka pendek secara berlebihan). Dalam keadaan tersebut kemudian timbul gejala yang menyebabkan suatu distress dan melalui dampak penularan yang sistemik (*contagion effects*) menjadi crisis. Krisis tersebut semula terjadi di sektor keuangan-perbankan, kemudian melebar menjadi krisis ekonomi yang secara sistemik melebar menjadi krisis sosial, politik dan akhirnya krisis kepemimpinan nasional. Ini mungkin lebih tepat untuk digunakan menggambarkan perkembangan krisis di Indonesia, akan tetapi secara umum apa yang terjadi di negara-negara lain di Asia, terutama Thailand dan Korea Selatan, juga serupa.

Aliran teori ekonomi dimana para penganut Ekonomi Klasik dengan berbagai versinya menilai bahwa krisis ekonomi disebabkan oleh pada bekerjanya mekanisme pasar, karena itu untuk memperoleh hasil terbaik pasar sebaiknya tidak dicampur tangani Pemerintah (pengaturan pasar yang minimal). Sebaliknya aliran Keynesian dengan berbagai versinya, mengatakan bahwa krisis ekonomi disebabkan karena pasar tidak stabil, mempunyai gerak konjungtur naik-turun, karena itu untuk hasil yang lebih baik Pemerintah sebaiknya melakukan intervensi di pasar melalui kebijakan-kebijakannya.

Dewasa ini pandangan-pandangan mengenai sebab timbulnya krisis yang beraneka ragam tersebut, mungkin dapat digolongkan menjadi dua kelompok; pertama yang mengatakan bahwa sebab utamanya adalah :

1. Masalah internal ekonomi nasional, terutama lemahnya lembaga keuangan (perbankan). (Paul Krugman, ahli ekonomi dari Stanford University)
2. Bahwa krisis ini timbul dari perubahan sentimen pasar, masalah eksternal, yang diperkuat dengan contagion effects. (Jeffrey Sachs, ahli ekonomi dari Harvard University).

Soedradjad Djiwandono (Gurubesar tetap Ilmu Ekonomi, Universitas Indonesia) menemukan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya krisis di Indonesia, yaitu :

1. *Krisis itu disebabkan oleh unsur eksternal, yaitu perubahan sentimen pasar uang secara cepat yang menimbulkan panik finansial. Panik finansial ini dengan proses penularan (contagion) menjadi krisis.*

Krisis di Indonesia merupakan kombinasi dari adanya gejala eksternal melalui dampak penularan (contagion) pada pasar finansial dengan ekonomi nasional yang mengandung berbagai kelemahan struktural, yaitu sistem perbankan dan sektor riilnya. Dalam perkembangannya krisis ekonomi menjalar ke krisis sosial-politik karena kelemahan pada sistem sosial-politik Indonesia.

2. *Krisis timbul karena adanya kelemahan struktural di dalam perekonomian nasional, dalam sistem keuangan atau perbankan dan praktek kapitalisme kroni atau kapitalisme 'ersatz'.*

Proses terjadinya dimulai dengan adanya gejala yang berdampak penularan pada pasar uang yang dihadapi Pemerintah dengan mengandalkan kebijaksanaan moneter yang berlaku saat itu (suatu pengembangan mata uang terkendali dengan penetapan batas ambang jual-beli valuta BI serta depresiasi merayap setiap tahunnya). Pelaksanaan kebijakan ini melalui pelebaran rentang jual-beli BI dan intervensi pasar pada waktu kurs di pasar uang 'spot' melampaui yang ditentukan. Akan tetapi sebagai dampak sampingan dari kebijakan moneter yang menyertai langkah intervensi pasar ternyata suku bunga yang meningkat telah memberatkan bank-bank yang kurang sehat, bahkan pada putaran selanjutnya bank yang sehatpun menderita dari penciptaan likuiditas dalam perekonomian. Dalam proses ini, gejala yang melanda pasar uang dengan dampak penularan ini pada akhirnya mengungkap kelemahan perbankan nasional. Sektor perbankan Indonesia yang memang lemah tersebut kemudian mengalami 'distress', yang secara cepat berubah menjadi krisis, karena turunnya kepercayaan masyarakat (deposan) yang kemudian melakukan penarikan dana secara bersama dan besar-besaran pada banyak bank.

Masalahnya menjadi sistemik, menyangkut banyak bank dan sistem perbankan. Pemilik dana melakukan tindakan penyelamatan dana mereka dengan memindahkannya pada bank yang dalam persepsi mereka aman. Ini dikenal dengan istilah 'flight to safety' dan 'flight to quality'. Setelah perbankan mengalami krisis, secara cepat kemudian masalahnya menjalar ke sektor riil dalam perekonomian (karena kredit kepada nasabah, termasuk untuk perusahaan-perusahaan banyak yang dihentikan atau suku bunganya ditingkatkan sangat tinggi) dan akhirnya terjadi krisis ekonomi (produksi dan perdagangan terganggu, kemudian lumpuh).

3. *Lemahnya sektor riil dari perekonomian nasional, antara lain karena praktek kapitalisme 'ersatz' yang penuh dengan KKN dengan masalah yang melekat padanya.*

Setelah itu, dengan cepat krisis menjalar menjadi krisis sosial dan politik, mungkin budaya, juga karena kelemahan struktural pada kehidupan sosial-politik serta lemahnya berbagai nilai budaya di masyarakat. Dengan demikian ternyata dampak penularan krisis itu tidak hanya bekerja secara geografis, menjalar dari Thailand ke Indonesia dan negara-negara lain di Asia. Akan tetapi juga dari kehidupan ekonomi ke kehidupan sosial dan politik di dalam suatu negara, karena kelemahan

struktural yang terkandung di dalamnya. Lemahnya struktur sosial-politik ini merupakan akibat dari penekanan pendekatan keamanan dengan penciptaan kestabilan sosial-politik secara dipaksakan dalam era kepemimpinan Orde Baru. Kestabilan ini dicapai melalui cara-cara represi, menghilangkan semua unsur yang berpotensi menjadi pesaing dari penguasa dengan cara apapun, bahkan yang melanggar hak azasi. Kita melihat bahwa selama ini semua organisasi, sosial, profesi, fungsional, apalagi politik, selalu mengalami ‘pembinaan’ atau ‘digarap’ dengan berbagai cara untuk tidak vokal, tidak menyuarakan sesuatu yang berbeda dari penguasa. Di dalam kehidupan politik tidak dikenal oposisi. Semua ini dikatakan tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia. Kestabilan yang tercapai dengan rekayasa ini merupakan kestabilan semu, dan tidak tahan lama.

4. *Sikap hidup yang ‘lebih besar pasak dari tiang’ serta sikap hidup yang tertutup dan mendasarkan diri atas ‘tribalism’ (Prof. Arif Budiman).*

Gejolak pasar uang yang dahsyat mengungkap borok lemahnya sistem perbankan dan menimbulkan krisis perbankan nasional. Krisis perbankan mengungkap borok kapitalisme ersatz dan menimbulkan krisis ekonomi. Akhirnya, krisis ekonomi mengungkap borok lemahnya sistem sosial-politik dan menimbulkan krisis sosial-politik serta kepemimpinan nasional.

Dampak Sosial Krisis Ekonomi

Dengan perkembangan yang membalik dari laju pertumbuhan produksi yang tinggi dalam jangka waktu yang lama menjadi penurunan tajam, maka akan berdampak pada :

1. Inflasi yang relatif terkendali menjadi hiperinflasi,
2. Masuknya modal asing dalam jumlah besar menjadi keluar dan larinya modal dalam jumlah besar,
3. Tingkat pengangguran menjadi sangat tinggi,
4. Jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan meningkat drastis,
5. Jumlah anak yang putus sekolah meningkat drastis,
6. Kejahatan meningkat tinggi dan banyak lagi dislokasi sosial dalam intensitas yang tinggi.

Ini semua yang mengungkapkan kelemahan struktural kehidupan sosial-politik di Indonesia. Didahului dengan demonstrasi mahasiswa yang terus menerus (Crosby Corporate Advisory, suatu perusahaan konsultan, mencatat, pada tahun 1998 ada lebih dari 2000 kali demonstrasi mahasiswa, 1300 kali aksi unjuk rasa oleh LSM, 500 pemogokan dan 50 kali huru-hara), kemudian menyusul kerusuhan 13-14 Mei yang mengungkapkan begitu banyak borok masyarakat kita. Ini akhirnya yang menjatuhkan pemerintahan pak Harto pada tanggal 21 Mei 1998.

Jalan Keluar Dari Krisis

Bagaimana Indonesia keluar dari krisis? Pembahasan ini tidak dapat dipisahkan dari proses terjadinya krisis itu sendiri. Perkembangan dari suatu gejala menjadi krisis, dan dari krisis yang satu ke yang lain telah melalui proses dari timbulnya masalah, langkah-langkah mengatasi masalah (*policy responses*) dan reaksi dari pasar serta masyarakat, baik di dalam negeri maupun di luar, semuanya telah tercampur. Berbagai pelajaran telah dapat dipetik, baik dari mengidentifikasi sebab-musabab maupun sifat dari krisis dan efektif/tidaknya langkah mengatasi masalah yang diambil. Dalam kaitan ini, harus diterima bahwa dalam menghadapi suatu *contagion*, kata-kata *the sooner the better* dan *the problems usually are bigger than expected*, memang sangat tepat.

1. Jalan keluar harus disesuaikan dengan masalah yang dihadapi. Karena krisis ini bukan bersifat single variable, maka jalan keluarnya tidak mungkin hanya dari satu aspek saja. Aspeknya banyak, yang satu terkait dengan yang lain, karena itu pendekatannya harus ‘sistemik’, dalam keseluruhan kaitannya. Tidak berarti semua harus diselesaikan sekaligus, karena dalam bidang ekonomi saja ada masalah jangka pendek dan jangka panjang, ada mikro dan makro yang semuanya harus diselesaikan. Dalam hal ini *pemilihan prioritas dan pentahapan (sequencing)* yang realistis mungkin perlu diperhatikan. Namun dari pelajaran di atas, karena kita harus menerima kekecewaan, maka pendekatan ini harus terus menerus, konsisten tapi fleksibel.

Dalam hal penentuan prioritas, kita harus keluar dari krisis yang telah secara total melanda kehidupan ini. Ibarat orang sakit, saat krisis harus dilalui dahulu dengan menciptakan kestabilan. Pendarahan harus dihentikan dahulu. Masalah krisis itu sendiri dari segi penanganannya masih berkisar pada belum adanya kepercayaan yang mantap. Untuk seluruh kehidupan dalam masyarakat, krisis yang harus dihentikan dulu adalah kepercayaan kepada pimpinan nasional, pemerintah dan lembaga tinggi negara. Saya berpendapat bahwa krisis kepercayaan ini bersumber, bukan pada landasan hukum formalnya, konstitusional atau tidaknya, akan tetapi lebih pada legitimasinya. Presiden dan seluruh anggota kabinet, lembaga legislatif dan yudikatif serta ABRI masih belum memperoleh kepercayaan tersebut secara penuh. Ini aspek diluar ekonomi yang sangat penting harus diselesaikan. Perlu saya berikan catatan di sini, pada waktu kepercayaan itu masih ada, pelaku pasar tidak terlalu menuntut, mereka menerima berbagai kekurangan yang terjadi. Akan tetapi pada waktu kepercayaan telah hilang, maka tuntutan mereka semakin banyak, menyangkut berbagai aspek diluar ekonomi-keuangan. Kita memang bisa mengatakan, tidak mau didekte pasar. Tetapi masalahnya bukan didikte atau tidak oleh pasar atau oleh IMF. Kenyataannya adalah bahwa pelaku pasar: para investor, para kreditor, atau mitra usaha akan terus menunggu sampai masalah yang berkaitan dengan aspek-aspek ini diselesaikan.

2. Beberapa aspek: kebijakan makro, moneter dan fiskal untuk mengatasi masalah nilai tukar, inflasi dan memburuknya perekonomian, kebijaksanaan restrukturisasi keuangan dan perbankan, termasuk restrukturisasi pinjaman perusahaan dan restrukturisasi perusahaan, kebijaksanaan restrukturisasi sektor riil, kebijakan restrukturisasi kelembagaan, dan penanggulangan dampak sosial krisis dengan program jaringan sosial. Pendekatannya sendiri, dari cara penanggulangan gejala moneter pada tingkat permulaan sampai meminta bantuan IMF dalam bentuk 'stand-by arrangement' dengan segala aspeknya bisa dibahas secara tersendiri.
3. Langkah positif harus dilakukan pemerintah (transparansi, kebebasan pers, kepedulian pada hak azasi dan proses penyelenggaraan kehidupan yang lebih demokratis, dimulai dengan mempersiapkan pemilu), akan tetapi tetap saja masalahnya, pemerintahan yang 'legal' ini belum 'legitimate', belum mempunyai kredibilitas yang mantap. Krisis kepercayaan terhadap pimpinan nasional, terhadap lembaga legislatif, yudikatif dan ABRI nampak sangat mencolok. Kekacauan sosial dengan berbagai macam pertentangan, atau antar suku, antar daerah, antar agama masih marak.
4. Untuk keluar dari krisis terlebih dahulu harus ada suatu titik balik, suatu 'turning point', dari pesimisme menjadi optimisme, dari ketidakpercayaan menjadi percaya, dari tanpa harapan menjadi penuh harapan.

Titik balik ini harus dimulai dari pimpinan nasional, dari pemerintah yang dipercaya masyarakat dengan semua unsur-unsurnya di dalam negeri dan yang dipercaya oleh negara-negara maju serta negara-negara lain dan lembaga-lembaga multilateral, para kreditor serta investor yang sangat dibutuhkan Indonesia untuk bangkit kembali. Di Korea dan Thailand titik balik ini terjadi dengan pergantian pemerintahan. Di Indonesia pimpinan nasional telah ganti tetapi masih banyak menunjukkan sifat kepanjangan dari yang lama.

Belajar Dari Krisis

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, krisis Indonesia merupakan gabungan dari faktor ekstern dan kelemahan didalam yang secara bergandengan telah menimbulkan proses 'contagion' secara meluas dan mendalam dan telah menyebabkan krisis yang dialami Indonesia menjadi paling buruk di antara negara-negara yang menderita krisis. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari terjadinya krisis di Indonesia, yaitu :

1. **Kelemahan di dalam bidang ekonomi:** kepercayaan pasar, baik domestik maupun asing serta kepercayaan masyarakat luas sangat tipis terhadap rupiah yang masih lemah dan tidak kunjung

menguat. Hal serupa terjadi dengan perbankan dan lembaga keuangan yang lain, serta kemampuan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah pinjaman mereka.

- a) *besarnya pinjaman perusahaan jangka pendek dalam mata uang asing (dollar) tanpa ada perlindungan/ hedging.* Praktek pembiayaan usaha yang sangat mengandalkan pinjaman sehingga debt to equity ratio di Indonesia terlalu tinggi (highly leveraging). Dana ini digunakan untuk investasi yang kurang baik diperhitungkan resikonya; mempunyai sifat menggelembung (bubble), bahkan spekulatif, seperti properti. Penghasilan investasi dalam rupiah, padahal sumber dananya, bahkan yang dari dalam negeri, dalam dollar. Investasi jangka panjang dibiayai dengan pinjaman jangka pendek. Semua ini secara perhitungan ekonomi sudah membahayakan. Padahal masih ditambah lagi dengan banyaknya pemborosan dan kebocoran karena lemahnya 'governance' dalam praktek kapitalisme kroni.
- b) *Lemahnya sistim perbankan di Indonesia: banyaknya bank dengan permodalan yang tidak kuat, besarnya kredit macet dan kepatuhan terhadap peraturan kehati-hatian yang lemah, kurang transparansi dengan pengawasan yang tidak kuat pula serta 'governance' yang lemah pada perbankan sendiri maupun pihak otoritanya.* Ini masih ditambah dengan kurangnya transparansi, pada pemerintah dan swasta, sehingga menimbulkan banyak salah pengertian di masyarakat (misalnya masalah BLBI yang sangat pelik menjadi lebih kompleks lagi karena pengertian yang tidak akurat atau tidak lengkap dari banyak pihak, juga dengan arti dan konsekuensi dari kepemilikan bank, dsb)
- c) *Kelemahan sektor riil, sebagai akibat dari 'crony capitalism' dengan ketidak efisienan praktek monopoli dan oligopoli serta kebocoran karena korupsi dan kebocoran-kebocoran lain.*

2. Di luar ekonomi ;

- a) *Adanya kelemahan struktur sosial dan politik.* Sistim kenegaraan kita yang terlalu terpusat pada kekuasaan eksekutif dan mementingkan kestabilan sosial dan politik dengan cara yang represif, meniadakan segala bentuk oposisi dan beda pendapat (dissent) di semua kehidupan bernegara dan bermasyarakat, telah menghasilkan kestabilan yang 'semu'. **Kestabilan semu ini rontok sangat cepat pada waktu Indonesia di landa krisis ekonomi.** Jadi krisis ekonomi telah mengungkap lemahnya kelembagaan sosial dan politik Indonesia, sebagaimana gejala keuangan (kurs) telah mengungkap lemahnya kelembagaan perbankan dan keuangan Indonesia. Pada waktu keadaan ekonomi bagus, kelemahan-kelemahan ini, meskipun diketahui oleh kebanyakan orang, tidak perlu ahli atau pakar (coba diingat masalah kebocoran yang dimasyarakat sejak tahun 1993 sering dikaitkan dengan pernyataan Prof. Sumitro di kongres ISEI di Surabaya tentang tingginya ICOR di Indonesia dibandingkan Thailand) gampang dilupakan.¹¹ Keadaan ekonomi yang bagus telah meninabobokkan upaya memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada di masyarakat. Demikian pula rekayasa menciptakan kestabilan (yang semu itu) - terutama cara-cara yang beragam dari yang halus sampai yang melanggar hak azasi - telah menekan berbagai arus yang berusaha melakukan koreksi di masa Orde Baru.
- b) *Untuk dapat 'sustainable' sistim ekonomi (pasar) menuntut adanya kelembagaan yang kuat, seperti sistim keuangan dan perbankan, sistim kepemilikan, sistim hukum, baik ketentuan perundangan, penegakan, pengadilan serta sanksi, demikian pula proses demokrasi.* Pelaksanaan sistim demokrasi juga menuntut adanya kelembagaan yang kuat, termasuk kelembagaan hukum tadi.

3. Beberapa sifat yang mendorong krisis atau mempersulit daya tahan menghadapi gejala:

- o *hidup yang lebih besar pasak dari tiang pada taraf nasional, perusahaan, dan secara individu, baik dalam kegiatan ekonomi maupun hidup hidup bermasyarakat dan bernegara*
- o *krisis nilai budaya; ketertutupan, feodalistis dan 'tribalism'*

Penanganan masalah lemahnya rupiah, inflasi, penyehatan perbankan, pinjaman perusahaan swasta, dsb., adalah mengenai pengadaan dan distribusi bahan pokok yang sangat sulit karena sarana dan prasarana jaringan distribusi yang sangat menyedihkan sebagai akibat tindakan penjarahan dan pembakaran yang sangat brutal. Ini akan memakan waktu untuk dapat pulih, akan tetapi terutama untuk pengadaan dan distribusi bahan pokok harus segera ditangani. Bantuan dan kerjasama dari luar harus pula digalakkan dalam hal ini. Dalam pembangunan sarana dan prasarana distribusi, masalah yang dihadapi tidak hanya pembangunan fisik, akan tetapi memulihkan kepercayaan pada para pelaku yang, terutama pada saat terjadinya kekacauan, merasa sama sekali tidak memperoleh perlindungan dari aparat keamanan.

Membangkitkan kegiatan ekspor tidak dapat ditunggu terlalu lama, ini merupakan keharusan. Karena ini sebagian menyangkut penyelesaian masalah pinjaman perbankan, maka ini harus didahulukan dalam penanganannya. Dalam beberapa hal, seperti ekspor komoditi tradisional Indonesia, meskipun kemampuan ekspor itu tetap ada, hilangnya kepercayaan perbankan negara mitra dagang kita terhadap perbankan nasional mempersulit pelaksanaan ekspor tersebut. Keputusan Pemerintah untuk meminta BI membayar tunggakan pinjaman perbankan dalam money market line serta pinjaman perdagangan berkaitan dengan kesepakatan mengenai pinjaman swasta di Frankfurt 4 Juni yang lalu mudah-mudahan dapat menggelindingkan fasilitas yang sangat vital bagi realisasi ekspor ini. Dalam impor pangan dan obat-obatan, walaupun hubungan perbankan dalam mendukung perdagangan ini tertolong dengan adanya garansi kredit, lemahnya rupiah tetap mempersulit realisasi impor tersebut. Pinjaman dan bantuan dari berbagai negara dalam kaitan ini harus terus diupayakan dan segera dilaksanakan.

Kalau krisis telah dilalui, maka kerja keras harus dilanjutkan dengan kembali pada kegiatan pembangunan nasional. Landasan kegiatan harus diperbaharui, meninggalkan kebiasaan atau praktek-praktek yang tidak dapat mendukung pembangunan yang berkesinambungan (*sustainable*). Semua pelaku harus memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudent*), dunia usaha tidak boleh lagi highly leverage, mempunyai debt to equity ratio yang tidak sehat, apalagi dengan exposure yang terlalu tinggi risikonya.

Bank dan lembaga keuangan harus benar-benar prudent, mencukupi permodalan serta mempunyai CAR yang sehat, menjalankan kegiatannya secara transparan dengan mengikuti ketentuan disclosure secara disiplin dalam sistim pengawasan yang dilaksanakan secara ketat. Ini menuntut aturan yang jelas, perlindungan hukum yang mantap.

C. PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK

Krisis Ekonomi dan Campur Tangan IMF dan Bank Dunia

Dua lembaga “super” yang paling berpengaruh dalam menciptakan sistem ekonomi pasar bebas dunia sesuai agenda Neoliberalisme, yaitu International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia. Negara-negara Asia yang terkena serangan spekulator antara lain Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, Korea Selatan, Taiwan, dan Cina. Namun, dampak serangan krisis moneter tahun 1997/1998 berbeda tiap negara. Singapura, Malaysia, Taiwan, dan Cina dapat menghadapi krismon tanpa bantuan IMF Tetapi Thailand, Korea Selatan, dan terutama Indonesia terpaksa minta bantuan IMF Menurut Ichsan (2003), beda di antara kedua kelompok negara tersebut adalah jumlah “uang panas” yang diparkir oleh investor internasional di masing-masing negara. Yang dimaksudkan dengan uang panas di sini adalah modal investasi dengan mobilitas tinggi yang siap di “parkir” jika keadaan menguntungkan dan bisa pula cepat “terbaring” dan suatu negara jika kondisi ekonomi-politik memburuk.

Walau sudah banyak kebijakan diambil, tapi krisis tidak juga mereda. Akhirnya, pemerintah terpaksa meminta bantuan IMF dan Bank Dunia, hasil penelitian menolak hipotesis yang mengatakan bahwa modal asing mendorong pertumbuhan ekonomi. Dampak bantuan utang luar negeri terhadap pembangunan bersifat ambigu, negara-negara berkembang terus menumpuk utang. Karena banyak pejabat memperoleh pemasukan sampingan dan utang tersebut, negara-negara berkembang semakin

kecanduan meminjam dana dan luar negeri. Seperti orang ketagihan heroin, tiap tahun jumlah utang negara-negara berkembang terus bertambah, sehingga akhirnya tidak bisa lepas (Korten, 1993: 104).

Dalam banyak kasus, bantuan IMF justru jadi biang masalah, sebab negara-negara yang dibantu umumnya masuk dalam “jebakan utang” yang sangat sukar dilepaskan. Hal ini dapat dilihat dan kenyataan bahwa negara-negara yang punya utang luar negeri umumnya bermasalah, seperti yang dialami negara-negara MBA (Meksiko, Brazil, Argentina) tahun 70-an; Argentina, seperti Indonesia, tak henti-henti dirundung malang; Uruguay, Kolombia, Ekuador, dan Turki menyusul; Meksiko dan Chili yang sudah lebih dulu sembuh, kembali “demam”.

Rizal pernah mengatakan: “Sudah waktunya bangsa kita belajar dan pengalaman sendiri selama empat tahun krisis dan pengalaman Argentina. Ketergantungan pada IMF hanya mampu menciptakan stabilitas temporer dan semu, pada saat yang bersamaan beban utang akan makin besar yang akan menjadi bom waktu krisis baru di kemudian hari”.

Keterbatasan politik juga dapat dilihat dan tingkah polah semua lembaga keuangan internasional seperti CGI, Bank Dunia, dan Bank Pembangunan Asia yang dikomandoi IMF untuk menekan pemerintah RI. Orang masih ingat dalam jangka waktu lama bagaimana dengan sangat congkak Comdessus mendikte pemerintah RI untuk melaksanakan berbagai kebijakan dan program yang dituangkan dalam Letter of Intent (LoI) yang ditentukan IMF. Dengan cara yang sama, Bank Dunia juga menyusun Country Strategy Report tentang Indonesia, yang harus di Indonesia agar tidak diisolasi oleh negara-negara CGI.

Sehubungan dengan buruknya kinerja IMF, Bandow dan Vasquez (1994) telah membuat daftar panjang kegagalan IMF dalam mengobati negara-negara yang terdaftar sebagai “pasien”nya. Negara-negara yang ditolong banyak yang tidak sembuh, justru semakin terperosok dalam utang yang semakin dalam. Semua negara berkembang yang terlilit utang saat ini, jika dibantu dengan cara seperti yang dipraktikkan selama ini oleh lembaga-lembaga keuangan internasional (IFIs) sampai kapan pun tak ada yang sanggup membayarnya.

C. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Sepanjang tahun 1998, rupiah terdepresiasi dengan lebih dari 70 persen yang mencapai puncaknya pada bulan Juli 1998 dimana nilai tukar mencapai Rp. 14.700 per US\$. Tahun 1997 PDB tumbuh sebesar 4,7 persen dan berkontraksi hingga minus 13,1 persen di tahun 1998. Inflasi yang hanya berkisar rata-rata 8,1 persen antara 1991-1996, pada tahun 1998 meningkat tajam menjadi 77,6 persen, yang sebagian besar berasal dari barang-barang yang diperdagangkan secara internasional.

Dampak dari krisis ekonomi di Indonesia adalah terjadinya begitu banyak perubahan mendasar dalam tatanan ekonomi, sosial, politik, dan budaya yang menentukan arah kehidupan bernegara, disatu sisi merupakan perubahan yang terbesar dalam sejarah Indonesia modern, namun disisi lain memberikan kontribusi bagi kompleksitas permasalahan pemulihan ekonomi.

Untuk keluar dari krisis terlebih dahulu harus ada suatu titik balik, suatu *‘turning point’*, dari pesimisme menjadi optimisme, dari ketidakpercayaan menjadi percaya, dari tanpa harapan menjadi penuh harapan. Kemudian, tindakan yang diambil harus disesuaikan dengan masalah yang dihadapi. Beberapa aspek seperti kebijakan makro, moneter dan fiskal untuk mengatasi masalah nilai tukar, inflasi dan memburuknya perekonomian, kebijaksanaan restrukturisasi keuangan dan perbankan, termasuk restrukturisasi pinjaman perusahaan dan restrukturisasi perusahaan, kebijaksanaan restrukturisasi sektor riil, kebijakan restrukturisasi kelembagaan, dan penanggulangan dampak sosial krisis.

Lemahnya perekonomian Indonesia, besarnya pinjaman perusahaan jangka pendek dalam mata uang asing (dollar) tanpa ada perlindungan/hedging, Lemahnya sistem perbankan di Indonesia dan lemahnya sektor riil dapat kita jadikan pelajaran agar Indonesia tidak terperosok dalam krisis ekonomi lagi. Di luar ekonomi juga terdapat kelemahan struktur sosial dan politik, sistem keuangan dan perbankan, sistem kepemilikan, sistem hukum dan sistem demokrasi itu sendiri. Hidup yang lebih

besar pasak daripada mendorong krisis baik dalam kegiatan ekonomi maupun hidup bermasyarakat dan bernegara serta krisis nilai budaya (ketertutupan, feodalistis dan 'tribalism).

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Bustanul dan Didik J. Rachbini. *Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Grasindo. 2001

Bappenas. *Pendahuluan Laporan Infrastruktur; Deputi Bidang Sarana dan Prasarana*. Oktober 2002

Djiwandono Soedradjad. *Krisis dan Pembaharuan Ekonomi-Moneter*. 2000

Erani Yustika Ahmad. *Perekonomian Indonesia: Satu Dekade Pascakrisis Ekonomi*. Unibraw. Februari 2007.

Hudiyanto. *Ekonomi Politik*. PT. Bumi Aksara. Jakarta. Maret 2004.

Krugman, Paul. *The Return of Depression Economic*. 2000.

Lim Say Boon. *The Art of the Possible*. FEER. 1999.

Media Indonesia, Januari 2000.

TokohIndonesia.com.

Kompas, Kamis 4 Juli 2002